

PARTISIPASI GENERASI MILENIAL DALAM MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2024

Noer Apptika Fujilestari^{1*}, Arlan Siddha², Risyah
Aprimayanti³.

¹²³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.

*Korespondensi: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)

ABSTRAK

This study examines the participation of the millennial generation in election supervision as an effort to strengthen democratic governance in Indonesia. The complexity of electoral stages requires active public involvement to ensure transparency, accountability, and integrity of the democratic process. This study aims to analyze the forms, roles, and challenges of millennial participation in election supervision. A descriptive qualitative method with a literature review approach was employed, drawing on books, regulations, and scholarly journal articles published within the last ten years. The findings indicate that millennials play a strategic role as participatory supervisors by utilizing social media and digital platforms to monitor electoral stages and report potential violations. Such participation enhances public oversight of election administration, although it is constrained by limited electoral literacy, institutional capacity, and public trust in political institutions. This study concludes that strengthening political literacy and institutional support is essential to optimize millennial participation in achieving accountable and democratic electoral governance.

Keywords: *millennial generation; election supervision; political participation; democratic governance.*

Noer Apptika Fujilestari, 2025. Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan
Pemilihan Umum 2024.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam politik merujuk pada keterlibatan individu dan kelompok dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kampanye politik, protes, keanggotaan partai politik, atau kegiatan politik lainnya. Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi yang sehat, karena memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik dan membentuk arah kebijakan. Partisipasi generasi muda

dalam politik mempunyai peranan yang penting untuk memastikan suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi generasi muda dalam politik dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan berkontribusi. Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam politik adalah investasi dalam masa depan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan (Masan, 2025). Dalam konteks Indonesia, partisipasi

politik masyarakat memiliki arti yang sangat strategis, mengingat pemilu merupakan sarana pelaksanaan kesetaraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk partisipasi politik yang semakin mendapat perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilu. Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, meningkatkan transparansi, serta menjaga integritas dan keadilan proses pemilu (Santoso, 2018).

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan perubahan struktur demografi penduduk, peran generasi muda, khususnya generasi milenial, menjadi semakin penting dalam proses politik dan kepemiluan. Generasi milenial umumnya didefinisikan sebagai kelompok penduduk yang lahir antara awal tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Putra, 2016). Karakteristik generasi milenial yang adaptif terhadap teknologi digital, kritis terhadap isu sosial-politik, serta aktif di media sosial menjadikan mereka aktor potensial dalam mendorong pengawasan pemilu yang partisipatif dan berbasis masyarakat.

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi

politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki pola partisipasi politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Partisipasi politik generasi milenial cenderung tidak selalu diwujudkan dalam bentuk konvensional seperti persekutuan partai politik, tetapi lebih banyak diwujudkan melalui aktivitas non-konvensional, seperti kampanye digital, diskusi politik di media sosial. Advokasi isu, serta keterlibatan dalam berbagai gerakan komunitas (Fadilah, 2019). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengawasan tahapan pemilu melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan generasi milenial secara aktif.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Kota Denpasar kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencentang atau menandai kemudian diganti dengan cara mencoblos, pada pemilu 2014 yang semuanya ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang tentu saja menjadi landasan hukum dari penyelenggara pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga bertujuan menghasilkan pemilu yang

berkualitas agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Arniti, 2020).

Pemilu 2024 merupakan momentum politik yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Kompleksitas tahapan Pemilu 2024, mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu, tuntutan pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh. Dalam situasi tersebut, keterlibatan generasi milenial dalam mengawasi tahapan pemilu menjadi sangat relevan untuk meminimalkan potensi pelanggaran seperti politik uang, penyebaran hoaks, mencakup media sosial, serta pelanggaran netralitas penyelenggara dan aparatur negara (Hermawan B. , 2020).

Partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan pemilu juga memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran demokrasi jangka panjang. Keterlibatan aktif generasi milenial tidak hanya berkontribusi pada terciptanya pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga berperan dalam pembentukan budaya politik partisipatif dan bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman keterlibatan langsung dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan literasi politik, rasa memiliki terhadap proses demokrasi, serta kepercayaan generasi muda terhadap institusi politik (Sari D. P., 2021)

Meskipun demikian, partisipasi generasi milenial dalam tahapan pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, minimnya

sosialisasi mengenai peran pengawasan partisipatif, serta apatisme politik yang dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap elite politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dari penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 menjadi penting untuk dilakukan . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kepemiluan dan partisipasi politik di Indonesia, sekaligus menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi penguatan pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan generasi milenial sebagai aktor utama demokrasi di era digital.

B. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington,dkk, 1994:4).

Menurut Ramlan Surbakti (1992), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk teks, dokumen, serta makna yang muncul dari interaksi sosial. Penelitian ini lebih menekankan pada proses, konteks, dan analisis yang dalam, dibandingkan dengan

kesimpulan berdasarkan generalisasi statistik (Miles, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang memerlukan tinjauan literatur yang melibatkan pencarian bahan bacaan yang relevan dalam buku atau artikel (Creswell J. W., 2017).

Metodologi studi literatur ini dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam tentang fenomena yang dipilih. Kasus yang dipilih menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Partisipasi Generasi

|

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah lima tahun terakhir menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 merupakan fenomena yang tidak terlepas dari dinamika tata kelola demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pengawasan pemilu yang partisipatif mencerminkan pergeseran hubungan antara negara dan warga negara. Model pemerintahan ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya partisipasi generasi milenial, terjadi pergeseran menuju pemerintahan yang lebih kolaboratif. Generasi milenial tidak hanya berperan sebagai pemilih, namun juga sebagai aktor pengawas yang berkontribusi dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka pemerintahan demokratis, partisipasi ini merupakan wujud dari penguatan keterlibatan sipil dan kontrol publik terhadap penyelenggara negara. Kajian yang dilakukan (**Sari D. &, 2021**) menegaskan bahwa pengawasan pemilu berbasis menjadi instrumen masyarakat penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan hasil pemilu, terutama ketika lembaga pengawas formal memiliki batasan sumber daya dan jangkauan. Generasi milenial, dengan karakteristik adaptif terhadap teknologi dan komunikasi digital, memainkan peran

Milenial pada Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Untuk memberikan informasi terkini yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah dan bermanfaat untuk kemajuan ilmiah lebih lanjut, metode kualitatif karenanya dapat melakukannya. Penggunaan metode studi literatur memerlukan sumber dan pengumpulan data melalui Pustaka, membaca, mencatat dan mengelola untuk dijadikan bahan penelitian yang kemudian dianalisis terlebih dahulu (Ahmad, 2018)

strategis dalam memperluas ruang pengawasan tersebut.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan pemilu oleh generasi milenial juga dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme checks and balances horizontal yang melibatkan warga negara. (**Hermawan D. S., 2022**) menjelaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu berkontribusi pada peningkatan transparansi proses politik, terutama dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara. Melalui media sosial dan platform digital, generasi milenial mampu membangun jejaring pengawasan informal yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap potensi perlindungan kekuasaan dan pelanggaran prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi generasi milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 tidak terlepas dari faktor meningkatnya literasi politik dan kesadaran terhadap hak-hak kewargaan. Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, literasi politik dipandang sebagai prasyarat penting bagi terbentuknya pemerintahan yang akuntabel dan responsif. (**Putri, 2023**) menyatakan bahwa generasi milenial yang memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan tahapan pemilu cenderung lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta berani menyampaikan kritik terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam mendukung kualitas demokrasi elektoral.

Selain literasi politik, perkembangan teknologi informasi menjadi faktor struktural

yang mendorong keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu. Dalam perspektif governance, teknologi digital berperan sebagai Enabler yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara. **(Yulianto, 2022)** menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu membuka partisipasi ruang yang lebih luas, inklusif, dan real - time. Generasi milenial sebagai digital native mampu memanfaatkan teknologi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu serta menyebarkan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Namun demikian, hasil kajian juga mengungkapkan adanya sejumlah hambatan yang menghambat optimalisasi partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, tantangan tersebut tidak hanya bersifat individual, namun juga bersifat struktural dan institusional. **(Kurniawan, 2021)** menggambarkan rendahnya pemahaman teknis mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu menjadi kendala utama bagi pengawas partisipatif dari kalangan generasi milenial. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat partisipasi dan kapasitas institusional warga negara.

Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap institusi politik juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi generasi milenial **(Dewi, 2023)** menemukan bahwa ketidakpercayaan terhadap elite politik dan penyelenggara negara berkontribusi terhadap sikap apatis sebagian generasi muda. Dalam kajian pemerintahan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik merupakan indikator lemahnya legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, Partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu perlu dipahami sebagai respons kritis terhadap praktik pemerintahan yang

belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 memiliki implikasi penting terhadap penguatan kualitas pemerintahan demokratis. **(Dalton, 2021)** menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam proses pengawasan pemilu berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Dalam konteks Indonesia, partisipasi generasi milenial berpotensi memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap negara, sekaligus mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih transparan dan profesional.

Lebih jauh, pengalaman generasi milenial dalam pengawasan pemilu juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembentukan budaya politik partisipatif. **(Sari D. , 2022)** menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pemerintahan serta mendorong partisipasi politik yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, hal ini merupakan modal sosial yang penting bagi konsolidasi demokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Partisipasi generasi milenial dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 mencerminkan penguatan demokrasi melalui partisipasi yang lebih aktif dan transparan. Partisipasi politik, seperti pengawasan pemilu, merupakan indikator penting berfungsinya demokrasi karena memungkinkan warga negara mengawasi dan mempengaruhi proses politik. **(Budiardjo, 2018)** menegaskan hal ini.

Pengawasan pemilu yang melibatkan generasi milenial sejalan dengan prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. **(Dwiyanto, 2020)** tekanan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses publik, seperti pemilu, berperan penting dalam mendorong terselenggaranya

pemerintahan yang akuntabel. Karakteristik adaptif generasi milenial terhadap teknologi memperkuat peran mereka dalam pengawasan pemilu berbasis digital.

Selain itu, Perkembangan informasi teknologi membuka peluang baru bagi pengawasan partisipatif. (Nugroho, 2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan memungkinkan warga negara, khususnya generasi muda, terlibat aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian, partisipasi generasi milenial dalam pengawasan Pemilu 2024 tidak hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya politik partisipatif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 merupakan bagian integral dari proses penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Partisipasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran kewargaan, pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penguatan peran generasi milenial dalam pengawasan pemilu perlu didukung melalui kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan literasi politik, penguatan kapasitas pengawas partisipatif, serta pembangunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 merupakan faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan generasi milenial mencerminkan pergeseran dalam

hubungan antara negara dan warga negara, di mana generasi ini tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor pengawas yang memiliki peran aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Keterlibatan generasi milenial dalam pengawasan pemilu 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya literasi politik, kesadaran kewargaan, serta pemanfaatan teknologi digital, yang memungkinkan mereka melakukan pengawasan secara lebih luas dan cepat. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru bagi generasi milenial untuk menjalankan fungsi kontrol publik terhadap penyelenggara pemilu. Partisipasi ini berkontribusi pada penguatan legitimasi hasil pemilu dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Namun, partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek individu maupun struktural. Rendahnya pemahaman teknis terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu, keterbatasan kapasitas institusional pengawasan partisipatif, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap elite politik dan institusi pemerintahan menjadi hambatan dalam optimalisasi peran generasi milenial. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat partisipasi belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang memadai.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peran generasi milenial dalam pengawasan pemilu, diperlukan kebijakan publik yang fokus pada peningkatan literasi politik, penguatan kapasitas pengawas partisipatif, serta pembangunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi. Partisipasi generasi milenial dalam proses pemilu tidak hanya menjaga terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga menjadi modal penting untuk mengintegrasikan demokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atik Rochaeni, N. A. (2025). Kekuatan Partai Politik Islam Dalam Pemilu Legislatif 2024 Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 782-795.

- Anwar, A. U. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% keterwakilan perempuan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 45-60.
- Pratiwi, D. &. (2024). Women's Representation in Islamic mass-based political parties. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 123-140.
- Saputra, R. (2025). Partai Islam dan Pemilu 2024. *Parapolitika*, 1-18.
- Creswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage.
- Newman, B. (2016). The Marketing of the President: Political marketing as Campaign Strategy. *Journal of Political Marketing*, 123-145.
- Less-Marshment, J. (2018). *Political Marketing: Principles and Applications (2nd ed)*. Routledge.
- Norris, P. (2018). Digital Campaigning and Political Communication. *International Political Science Review*, 145-160.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms Capital*. Greenwood.
- Putnam, R. D. (2020). *The Upswing: How America Came Together a Century ago and how we can do it again*. Simon.
- Katz, R. &. (2018). Democracy and The Cartelization of Political Parties. *Party Politics*, 6-19.
- Masan, A. M. (2025). PERAN GENERASI MUDA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA. *The Journalish Socian and Government*, 283-289.
- Santoso, T. (2018). Peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 765–782.
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical review: Teori perbedaan generasi. *Ekonomi dan Bisnis*, 9(18), 123–134.
- Fadilah, R. &. (2019). Partisipasi politik generasi milenial dalam demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 89–102.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dikota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Hermawan, B. (2020). Pengawasan partisipatif pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 15–28.
- Sari, D. P. (2021). Partisipasi politik generasi muda dalam pengawasan pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1), 45–60.
- Miles, M. B. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Ahmad, J. (2018). *Desain penelitian analisis isi (Content analysis)*. *Research Gate*, 5, 1–20.
- Sari, D. &. (2021). Pengawasan pemilu berbasis masyarakat dan legitimasi pemerintahan. *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola*, 4(2), 120–135.
- Hermawan, D. S. (2022). Pengawasan pemilu partisipatif dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Governance*, 7(1), 45–60.
- Putri, S. M. (2023). Literasi politik generasi milenial dan kualitas demokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–92.
- Yulianto, E. &. (2022). Digital governance dalam pengawasan pemilu. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 89–104.
- Kurniawan, A. (2021). Pengawasan pemilu dan penguatan demokrasi lokal. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(3), 201–216.
- Dewi, N. P. (2023). Kepercayaan publik dan partisipasi politik generasi muda dalam demokrasi elektoral. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 133–148.
- Dalton, R. J. (2021). *Citizens, political participation, and democracy*. Oxford University Press.
- Sari, D. (2022). Partisipasi generasi muda dan budaya politik demokratis. *Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 61–76.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dwiyanto, A. (2020). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2021). *Governance Digital dan Demokrasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

